**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN KHAS
DAERAH DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**

Ade Pratiwi Susanty, Andrew Shandy Utama

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: ade_pratiwi.susanty@yahoo.co.id, andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstract

Trade secret is information that is not known to the public in the field of technology and / or business, has economic value because it is useful in business activities, and is kept confidential by the owner of a trade secret. The problem is how is the legal protection of regional food products in the Pekanbaru City based on Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets? What are the obstacles in legal protection for regional food products in Pekanbaru City? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research indicate that the typical regional food products and their variations in Pekanbaru City are protected as a trade secret based on Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets because they are confidential, have economic value, and are kept confidential. If there is a violation of the trade secret, then there are strict criminal sanctions in Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets. Constraints in legal protection against trade secrets in the Pekanbaru City, namely there are no regional regulations specifically made to regulate and protect regional specialties, businesses do not know and understand the law regarding trade secrets, and regional specialties are the cultural heritage of the people taught hereditary and inherited from generation to generation without registered rights.

Keywords: Typical Foods, Trade Secrets, Legal Protection

Abstrak

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Permasalahannya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang? Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk-produk makanan khas daerah maupun variasinya yang ada di Kota Pekanbaru dilindungi sebagai sebuah rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang karena bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut, maka ada sanksi pidana yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Kota Pekanbaru yaitu tidak ada peraturan daerah yang dibuat secara khusus untuk mengatur dan melindungi makanan khas daerah, pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami hukum mengenai rahasia dagang, serta makanan khas daerah merupakan warisan kebudayaan masyarakat yang diajarkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa didaftarkan haknya.

Kata Kunci: Makanan Khas Daerah, Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi ini diharuskan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah resmi dibuka, maka produk-produk makanan dari negara-negara tetangga akan beredar dengan bebas di Indonesia. Terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas kualitas dan keamanan dari produk-produk yang diperjualbelikan di pasar. Kondisi tersebut di satu sisi sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk yang berkualitas dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan masyarakat untuk dapat memilih beraneka ragam produk yang diinginkannya. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat melemahkan eksistensi makanan tradisional yang merupakan makanan khas dari suatu daerah.²

Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya, terutama peningkatan kualitas

¹ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

² Indriyana Dwi Mustikarini, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 76.

produknya. Peningkatan kualitas produk bertujuan agar barang yang diproduksi oleh perusahaan dapat diminati oleh konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha termotivasi untuk membuat produk baru maupun mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Kegiatan untuk membuat produk baru maupun mengembangkan produk-produk yang sudah ada tersebut lahir dari sebuah pemikiran dan ide-ide kreatif yang dianggap berharga sehingga perlu untuk dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh kompetitor untuk saling menjatuhkan. Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).³

HaKI dipandang sebagai aset yang berharga bagi perusahaan karena dengan adanya perlindungan HaKI berarti memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan dan memanfaatkan atau memberikan hak tersebut kepada pihak lain. Rahasia dagang sebagai bagian dari HaKI berada dalam posisi yang sangat penting karena setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan memiliki strategi dagang masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, rahasia dagang dianggap sebagai salah satu HaKI yang sangat penting dalam perkembangan aktivitas bisnis. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2000.⁴

Perkembangan arus globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam lalu lintas perdagangan yang semakin kompleks permasalahannya. Aspek hukum menjadi sangat penting karena tuntutan berbagai kebutuhan yang mengedepankan legalitas. Hal ini tentunya akan semakin menarik karena adanya dominasi pasar global. Oleh karena perdagangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi setiap negara, maka sangat diperlukan perlindungan rahasia dagang untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan. Perlindungan rahasia dagang menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi sebab ketidakpastian atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi yaitu semakin maraknya persaingan bisnis yang tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim usaha secara keseluruhan.⁵

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

⁴ OK Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.

⁵ Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 28.

Salah satu permasalahan yang saat ini muncul di tengah-tengah masyarakat yaitu banyaknya produk-produk makanan dari luar negeri yang beredar di Indonesia akibat globalisasi dan perdagangan bebas. Kondisi tersebut ditemukan di Kota Pekanbaru yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat bisnis. Saat ini, Kota Pekanbaru telah mengalami perkembangan yang sangat pesat menuju kota metropolitan. Perkembangan ini dibuktikan dengan adanya pembangunan gedung-gedung yang tinggi, infrastruktur jalan dan jembatan, serta semakin menjamurnya bisnis hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat kuliner yang beroperasi hingga malam hari. Meskipun demikian, pelaku usaha yang menjual makanan khas daerah masih tetap terjaga eksistensinya di Kota Pekanbaru.

Pada prinsipnya, pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru tidak bisa melarang produk makanan dari luar negeri masuk ke Indonesia, tetapi yang harus dilakukan adalah strategi dalam menghadapinya. Pelaku usaha dituntut harus mampu untuk meningkatkan kualitas produknya dengan mengembangkan berbagai variasi yang menarik. Hal ini karena makanan khas daerah pasti memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda-beda di tiap daerah, sehingga ada perbedaan yang sangat mendasar dengan produk makanan dari luar negeri. Kreativitas pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru dalam mengembangkan berbagai variasi dari makanan khas yang dibuatnya harus dilindungi oleh pemerintah sebagai sebuah aset yang berharga di bidang HaKI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut.⁶

Dari observasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru, diketahui bahwa terdapat beberapa pelaku usaha yang menjual makanan khas Provinsi Riau dengan berbagai variasinya yang menarik. Makanan khas Provinsi Riau yang

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta, Pasal 1 Angka 1.

diperjualbelikan di Kota Pekanbaru antara lain yaitu bolu kemojo, lempuk durian, keripik nenas, roti canai, roti jala, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pelaku usaha makanan khas Provinsi Riau yang usahanya masih berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memahami pentingnya perlindungan rahasia dagang, sehingga tidak ada satupun pelaku usaha tersebut yang mendaftarkan kreasi dari makanan khas Provinsi Riau yang telah dibuatnya dan dikembangkannya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, hal yang diteliti adalah data primer.⁸

Responden dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, yaitu Hasan Basri yang merupakan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan serta M. Rizal sebagai staffnya, yang bertugas memberikan pelayanan informasi dan permasalahan hukum di bidang perdagangan.

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Produk Makanan Khas Daerah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan hukum apabila informasi tersebut bersifat sejatinya rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Informasi yang bersifat rahasia maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi yang mempunyai nilai ekonomi maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemiliknya atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta, Pasal 3.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta, Pasal 2.

rahasia dagang bertujuan untuk memajukan sektor perdagangan dan perindustrian yang mampu bersaing, baik level nasional maupun internasional, dengan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat serta memberikan perlindungan hukum sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Pelaku usaha di Kota Pekanbaru yang menjual makanan khas Provinsi Riau, meskipun tidak mengetahui mengenai adanya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tetap harus diberikan perlindungan hukum oleh negara agar kreasi dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan produk makanan khas daerah dapat terlindungi. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata dukungan dari pemerintah terhadap pelestarian kebudayaan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, pelaku usaha yang menjual makanan khas Provinsi Riau di Kota Pekanbaru yang terdaftar antara lain yaitu Bolu Kemojo Al-Mahdi, Lempuk Durian Mega Rasa, Bolu Gulung Nenas Vizcake, Roti Canai Ikhwan, Pondok Patin H. M. Yunus dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada dasarnya merupakan pengakuan dari negara terhadap hak atas kekayaan intelektual seseorang untuk menikmati kekayaan intelektual tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dijelaskan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
- b. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

- c. Melarang pihak lain untuk mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹¹

Pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang yang diketahuinya atau mengingkari perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjaga sebuah rahasia dagang.¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, suatu perbuatan dikatakan sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila seseorang memperoleh informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang yaitu mengungkapkan sebuah rahasia dagang yang penggunaannya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.

Dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap rahasia dagang, Kepala Seksi Informasi dan Hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Pekanbaru yang menjual makanan khas Provinsi Riau, antara lain yaitu:

- a. Merahasiakan resep makanan yang dibuatnya.
- b. Memberikan rahasia dagang hanya kepada keluarga dan/atau orang-orang yang dapat dipercaya.
- c. Membatasi akses karyawan untuk dapat memasuki ruangan produksi makanan.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta, Pasal 4.

¹² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, hlm. 125.

- d. Memberikan rahasia dagang kepada karyawannya dengan didasari oleh sebuah perjanjian agar merahasiakan resep makanan yang dibuatnya.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dimilikinya, pelaku usaha di Kota Pekanbaru yang menjual makanan khas Provinsi Riau sebagai pemegang hak rahasia dagang dapat menggugat ke pengadilan siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak yang melakukan pelanggaran tersebut berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan pelanggarannya.¹³ Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, mengenai kekhawatiran masyarakat terhadap banyaknya produk-produk makanan dari luar negeri yang beredar di Kota Pekanbaru akibat adanya perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Hal ini karena makanan khas Provinsi Riau maupun variasi dari makanan khas daerah tersebut yang dibuat oleh pelaku usaha lokal, selain memiliki keunikannya tersendiri, juga memiliki kelebihan dari segi cita rasanya yang khas dan kaya akan rempah-rempah, proses pembuatannya yang alami dan tanpa bahan pengawet, serta harga jualnya yang terjangkau. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberikan dukungan yang nyata dalam bentuk pemberian bantuan dana berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman lunak lainnya untuk modal usaha serta mempermudah perizinan usaha untuk pelaku usaha yang menjual makanan khas daerah, khususnya makanan khas Kota Pekanbaru.

Di dalam menghadapi persaingan bisnis kuliner yang ketat di Kota Pekanbaru, pelaku usaha yang menjual makanan khas daerah

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta, Pasal 11.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta, Pasal 12.

dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang baik agar tidak kalah bersaing dengan banyaknya produk-produk makanan dari luar negeri yang beredar di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, beberapa strategi bisnis yang dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru antara lain yaitu:

- a. Mengamati pasar dan mengenali pesaingnya. Pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru harus mampu mengamati pasar dengan tujuan untuk mengetahui potensi dari produk yang akan dipasarkan. Selain itu, pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru juga harus mampu mengenali pesaingnya dengan tujuan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari produk yang dibuatnya.
- b. Menciptakan produk yang berbeda. Pelaku usaha makanan khas di Kota Pekanbaru dapat menciptakan jenis makanan yang baru atau mengembangkan variasi dari jenis makanan yang telah ada, dengan berbagai keunikan, baik dari segi bentuk, warna, maupun rasa, yang dapat menarik minat masyarakat untuk mencobanya.
- c. Menonjolkan keunggulan produk. Pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru dapat mempromosikan keunggulan-keunggulan dari produk makanan yang dibuatnya, sehingga kelihatan perbedaan dengan produk-produk lainnya yang telah diperjualbelikan di pasaran.
- d. Mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaingnya. Pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru dapat mempelajari kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan dari pesaingnya dengan tujuan agar dapat menciptakan produk baru dengan kualitas yang mampu

bersaing di pasaran dan memiliki strategi dalam pemasaran produk yang lebih menarik.

- e. Menawarkan harga yang bersaing. Pelaku usaha makanan khas di Kota Pekanbaru harus mampu memasarkan produk yang dibuatnya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat agar dapat bersaing dengan produk-produk lainnya di pasaran.
- f. Membuat *event* untuk mempromosikan produk. Pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru dapat mengadakan bazar untuk mempromosikan produknya, dengan disertai adanya diskon harga maupun bonus dengan tujuan agar menarik perhatian masyarakat.
- g. Memanfaatkan media sosial. Pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru harus mampu memanfaatkan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* untuk mempromosikan produknya mengingat pesatnya penggunaan teknologi.

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi tersebut diproteksi kerahasiaannya karena secara moral memberikan penghargaan kepada orang yang menemukannya dan secara materi memberikan insentif kepada orang tersebut. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk melindungi rahasia dagangnya yaitu dengan mengaturnya di dalam perjanjian kerja.¹⁵

Adanya perlindungan hukum dari negara terhadap rahasia dagang, pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru tidak perlu khawatir resep makanannya akan dicuri oleh orang lain. Kepala Seksi Informasi dan Hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang orang lain atau melakukan perbuatan

¹⁵ Syarifa Mahila, "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 24.

yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pemberian sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran terhadap hak rahasia dagang milik orang lain.

2. Hambatan-hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Produk Makanan Khas Daerah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut.¹⁶

Pengaturan mengenai rahasia dagang bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan jaminan perlindungan hukum bagi rahasia dagang yang lebih efektif.
- b. Mendorong penemuan-penemuan baru dengan cara menyediakan aturan hukum yang menjamin perlindungan terhadap pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan penemuan-penemuan tersebut, yang oleh penemunya sengaja disimpan sebagai rahasia dagang.
- c. Mengamankan kepentingan pemilik rahasia dagang dan penggunaan rahasia dagang oleh karyawannya, khususnya dalam hal terjadinya perpindahan karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- d. Mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis di bidang perdagangan dengan cara mencegah terjadinya praktik-praktik bisnis yang curang seperti pencurian rahasia dagang.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta, Pasal 1 Angka 1.

Perlindungan rahasia dagang dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi yang berada dalam satu paket yang tidak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai HaKI dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai, maka secara otomatis akan mendorong iklim usaha yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai usaha untuk menanggulangi bentuk-bentuk pelanggaran rahasia dagang harus mendapat dukungan dari semua pihak.

Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dari produk makanan khas daerah yang ada di Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Faktor hukum, Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Akan tetapi, di Kota Pekanbaru tidak ada peraturan daerah yang dibuat secara khusus untuk mengatur dan melindungi makanan khas daerahnya. Dalam rangka menjaga eksistensi sekaligus melindungi makanan khas daerah maupun variasinya, Pemerintah Kota Pekanbaru diharuskan untuk segera menggagas sebuah peraturan daerah untuk melindungi produk makanan khas daerah karena masih terjaga eksistensinya di masyarakat.
- b. Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha, Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Akan tetapi, banyak pelaku usaha makanan khas daerah di Kota Pekanbaru yang tidak mengetahui dan memahami hukum, khususnya mengenai rahasia dagang. Hal ini dapat dilihat dari minimnya produk makanan khas

daerah dan variasinya di Kota Pekanbaru yang didaftarkan sebagai sebuah hak kekayaan intelektual.

- c. Faktor kebiasaan masyarakat, Sebagai sebuah warisan kebudayaan, makanan khas daerah biasanya di masyarakat diajarkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa didaftarkan haknya. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan bisnis makanan khas daerah di Kota Pekanbaru sebagian besarnya dijalankan seadanya.

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang diberikan oleh negara pada hakikatnya bersumber dari hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang dan penerima rahasia dagang dalam bentuk perjanjian kerja atau pemberian lisensi. Hubungan keperdataan tersebut memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif mengenai rahasia dagang, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Meskipun awalnya merupakan hubungan keperdataan berupa bisnis, namun ada intervensi dari negara apabila terjadinya pelanggaran terhadap sebuah rahasia dagang, yaitu adanya penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Akan tetapi, delik yang ada pada pelanggaran rahasia dagang adalah delik aduan, sehingga aparat penegak hukum sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pemegang hak rahasia dagang sebagai pihak yang dirugikan.¹⁷

Apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran rahasia dagang, maka aparat penegak hukum berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

¹⁷ Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5, 2016, hlm. 82-83.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang rahasia dagang.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukaan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain tersebut.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang rahasia dagang.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.¹⁸

Pada dasarnya, sebuah rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara apabila informasi yang didaftarkan sebagai rahasia dagang sifatnya rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.¹⁹ Diharapkan adanya sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang kepada para pelaku usaha yang memproduksi makanan khas daerah maupun variasinya.

E. Kesimpulan

Produk-produk makanan khas daerah maupun variasinya yang ada di Kota Pekanbaru dilindungi sebagai sebuah rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang karena bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Apabila terjadi

¹⁸ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, 2011, hlm. 40.

¹⁹ Lili Anggraini dan Hasyim, "Perlindungan Hukum Perdata Dagang terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia", *Jurnal Niagawan*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 118.

pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut, maka ada sanksi pidana yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Kota Pekanbaru yaitu tidak ada peraturan daerah yang dibuat secara khusus untuk mengatur dan melindungi makanan khas daerah, pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami hukum mengenai rahasia dagang, serta makanan khas daerah merupakan warisan kebudayaan masyarakat yang diajarkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa didaftarkan haknya.

Daftar Pustaka

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5, 2016, hlm. 69-84.

Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Indriyana Dwi Mustikarini, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 75-88.

Lili Anggraini dan Hasyim, "Perlindungan Hukum Perdata Dagang terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia", *Jurnal Niagawan*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 113-121.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.

Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, 2011, hlm. 30-42.

Syarifa Mahila, “Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 16-24.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2000, Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 di Jakarta.